

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Sumatera Barat

Laras Ramadhani¹, Jelita Winanda Agustin², Sintia Sri Wulandari³, Chelsea Sundari⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat
email korespondensi: larasramadhani570@gmail.com¹, jelitawinandaa@gmail.com²,
Sintiasriwulandari6@gmail.com³, chelseasundari307@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received 30/10/2025

Revised 30/10/2025

Accepted 31/10/2025

Abstract

This research explores how Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in West Sumatra apply the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) when preparing their financial statements. In practice, many MSMEs still face difficulties in understanding and implementing accounting standards. SAK EMKM, issued by the Indonesian Institute of Accountants, is designed to simplify the preparation of financial statements for smaller businesses. Using a descriptive qualitative method, this study draws on literature reviews, interviews with several MSME owners in Padang, Bukittinggi, and Payakumbuh, and an analysis of documents from the West Sumatra Cooperative and MSME Agency. The findings reveal that most MSMEs have not fully adopted SAK EMKM due to limited accounting knowledge, low financial literacy, a lack of skilled personnel, and insufficient support from government institutions. However, MSMEs that have implemented SAK EMKM report tangible benefits—such as clearer financial information, easier access to funding, and stronger internal control. Overall, the level of implementation remains low, but the standard has significant potential to improve business transparency and accountability if supported consistently through training, mentoring, and outreach by the government, academics, and financial institutions.

Keywords: SAK EMKM, MSMEs, Financial Reporting, West Sumatra

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi tersebut. SAK EMKM diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman sederhana untuk membantu usaha kecil menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggabungkan studi literatur, wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh, serta analisis dokumen dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan SAK EMKM secara menyeluruh karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, rendahnya literasi keuangan, minimnya sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan dan sosialisasi dari instansi pemerintah terkait. Meski begitu, beberapa UMKM yang telah mencoba menerapkan SAK EMKM merasakan manfaat seperti laporan keuangan yang lebih terstruktur, kemudahan mendapatkan pembiayaan, dan peningkatan pengendalian internal. Secara umum, penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat masih tergolong rendah, tetapi memiliki potensi besar untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas usaha jika mendapat dukungan berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

Kata Kunci: SAK EMKM, UMKM, laporan keuangan, Sumatera Barat



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan UKM (2022), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha atau 99,9% dari total unit usaha. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Keberadaan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian sekaligus penyelamat ketika krisis moneter 1998 dan krisis global 2008.

Di tingkat daerah, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi UMKM yang besar. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat (2021) mencatat terdapat lebih dari 600 ribu unit UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sektor dominan meliputi perdagangan, kuliner khas Minangkabau, industri kreatif berbasis budaya lokal, serta pariwisata yang semakin berkembang. UMKM di Sumatera Barat tidak hanya berperan dalam menyediakan lapangan kerja, tetapi juga menjaga eksistensi nilai budaya dan kearifan lokal melalui produk-produk yang dihasilkan. Namun, peran penting tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas tata kelola usaha, terutama dalam aspek akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan klasik yang dihadapi sebagian besar UMKM adalah lemahnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Banyak pelaku usaha masih mengandalkan pencatatan manual sederhana, bahkan tidak sedikit yang hanya mengingat transaksi tanpa dokumentasi tertulis. Kondisi ini membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi, sehingga informasi yang dihasilkan sering kali tidak akurat, tidak relevan, dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan karena tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Menyadari pentingnya laporan keuangan yang standar bagi UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016 menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini merupakan bentuk penyederhanaan dari SAK Umum dan SAK ETAP yang dianggap terlalu kompleks bagi UMKM. Dalam SAK EMKM, pelaporan keuangan difokuskan pada tiga laporan utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sederhananya, standar ini didesain agar dapat dipahami oleh pelaku UMKM yang minim latar belakang akuntansi sekalipun (IAI, 2016).

Walaupun SAK EMKM telah disediakan, kenyataannya implementasi di lapangan masih rendah. Penelitian Susanti & Rahmawati (2020) menemukan bahwa sebagian besar UMKM tidak menggunakan standar tersebut karena keterbatasan pemahaman akuntansi dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Hidayat (2019) juga mengungkapkan bahwa banyak UMKM lebih fokus pada aspek pemasaran dan produksi, sementara pencatatan keuangan dianggap kurang penting. Padahal, tanpa laporan keuangan yang sesuai standar, sulit bagi UMKM untuk mengukur kinerja usaha secara objektif maupun menarik minat investor.

Di Sumatera Barat, kondisi tersebut semakin kompleks karena sebagian besar pelaku UMKM merupakan usaha keluarga atau tradisional yang beroperasi dalam skala kecil. Budaya bisnis yang masih mengandalkan kepercayaan pribadi serta keterbatasan akses terhadap teknologi akuntansi memperburuk situasi. Akibatnya, meskipun regulasi berupa SAK EMKM sudah tersedia, pemanfaatannya belum maksimal. Di sisi lain, terdapat pula contoh UMKM yang telah berhasil menerapkan standar ini dan merasakan manfaat nyata, seperti peningkatan kredibilitas di mata lembaga keuangan dan kemudahan dalam mengakses modal (Putri & Arifin, 2021).

Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian mengenai penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat penting dilakukan. Tidak hanya untuk memahami sejauh mana implementasi di lapangan, tetapi juga untuk menemukan faktor-faktor penghambat sekaligus potensi solusi yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan UMKM di daerah ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul baik dari sisi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, literasi keuangan yang rendah, serta minimnya penggunaan teknologi pencatatan, maupun dari sisi eksternal, seperti kurangnya pendampingan pemerintah, keterbatasan akses pelatihan, serta rendahnya kesadaran lembaga keuangan untuk mendorong kepatuhan standar. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di Sumatera Barat terhadap SAK EMKM? Pertanyaan ini penting karena pemahaman yang memadai merupakan prasyarat utama bagi pelaku usaha untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar. 2. Bagaimana bentuk penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM di Sumatera Barat? Rumusan ini diarahkan untuk menilai apakah

laporan keuangan yang disusun UMKM sudah sesuai dengan ketentuan standar, atau masih bersifat sederhana dan tradisional. 3. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM dalam menerapkan SAK EMKM? Pertanyaan ini menekankan pada identifikasi hambatan nyata yang dialami, baik dari sisi internal usaha maupun dukungan eksternal. 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM pada UMKM di Sumatera Barat? Pertanyaan ini berorientasi pada solusi, dengan menekankan peran pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan UMKM di Sumatera Barat ini memiliki beberapa tujuan yang saling terkait. Pertama, menganalisis tingkat pemahaman dan implementasi SAK EMKM oleh UMKM di Sumatera Barat. Tujuan ini penting karena meskipun SAK EMKM telah berlaku sejak 2016, tingkat penerapannya di lapangan masih sangat bervariasi. Ada sebagian UMKM yang sudah mencoba mengaplikasikan standar ini, ada yang hanya sebatas mendengar, dan ada pula yang sama sekali belum mengetahui keberadaannya. Penelitian ini ingin mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya standar akuntansi tersebut. Kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Kendala yang dimaksud mencakup aspek literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, hambatan teknologi, maupun rendahnya kesadaran terhadap manfaat laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akar permasalahan rendahnya penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat. Ketiga, mengevaluasi manfaat penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hal ini mencakup sejauh mana standar akuntansi tersebut mampu meningkatkan keandalan, relevansi, keterbandingan, dan keterpahaman laporan keuangan. Evaluasi manfaat juga meliputi bagaimana penerapan SAK EMKM dapat mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, meningkatkan transparansi usaha, serta memperkuat pengendalian internal. Keempat, memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat. Rekomendasi ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga asosiasi bisnis. Bentuk rekomendasi bisa berupa penyusunan program pelatihan dan pendampingan akuntansi bagi UMKM, pemanfaatan aplikasi digital pencatatan keuangan, hingga peningkatan peran akademisi dalam melakukan edukasi dan penelitian terapan. Kelima, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik mengenai akuntansi UMKM. Sejauh ini, penelitian mengenai implementasi SAK EMKM di daerah masih relatif terbatas. Dengan mengkaji kasus di Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini bukan hanya untuk memahami fenomena penerapan SAK EMKM secara deskriptif, tetapi juga untuk menemukan solusi praktis yang dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dimensi ganda: dimensi akademis, yaitu memperluas pengetahuan ilmiah di bidang akuntansi UMKM, dan dimensi praktis, yaitu memberi manfaat nyata bagi pengembangan usaha kecil dan menengah di Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian: 1. **Manfaat Akademis:** Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi UMKM. Selama ini, literatur mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) masih relatif terbatas, terutama pada konteks lokal di daerah seperti Sumatera Barat. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada UMKM di kota besar atau wilayah Jawa, sedangkan penelitian di luar Jawa belum banyak dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana kondisi penerapan SAK EMKM di daerah yang memiliki karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi yang khas.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik akuntansi di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi keuangan. Dengan membandingkan teori dengan praktik nyata di lapangan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian teoretis sekaligus menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih aplikatif. 2. **Manfaat Praktis:** Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Hasil penelitian yang memuat identifikasi kendala dan rekomendasi praktis akan membantu UMKM dalam memahami kelemahan sistem pencatatan yang mereka gunakan serta

memberikan solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan kapasitas masing-masing usaha. Misalnya, pemanfaatan aplikasi pencatatan sederhana berbasis digital atau penerapan pelatihan akuntansi dasar yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha. Lebih jauh, manfaat praktis juga dapat dirasakan oleh lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi. Dengan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM melalui penerapan SAK EMKM, lembaga keuangan akan lebih mudah dalam menilai kelayakan usaha calon debitur. Hal ini pada gilirannya akan memperluas akses permodalan bagi UMKM yang selama ini terhambat karena keterbatasan laporan keuangan. 3. Manfaat Kebijakan: Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan UMKM, terutama dalam aspek literasi keuangan dan akuntansi. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran dinas koperasi, lembaga pelatihan, maupun perguruan tinggi dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, dan monitoring penerapan SAK EMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, asosiasi bisnis, dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, manfaat penelitian tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara lebih luas. 4. Manfaat Sosial. Di luar aspek akademis, praktis, dan kebijakan, penelitian ini juga memiliki manfaat sosial. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari sisi akademis, memperkaya literatur; dari sisi praktis, memberikan solusi nyata bagi UMKM; dari sisi kebijakan, menjadi dasar pengambilan keputusan; dan dari sisi sosial, mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada level konseptual, tetapi juga membawa dampak nyata bagi berbagai pemangku kepentingan.

GRAND THEORY

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dijelaskan melalui sintesis beberapa teori utama, yaitu teori adopsi inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) oleh Rogers (2003), teori institusional (*Institutional Theory*) oleh DiMaggio dan Powell (1983), serta teori sumber daya (*Resource-Based View*) oleh Barney (1991). Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa proses penerapan SAK EMKM berjalan lambat, bervariasi, dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal di lingkungan UMKM.

Menurut teori adopsi inovasi Rogers (2003), setiap inovasi — termasuk penerapan standar akuntansi baru seperti SAK EMKM — akan diadopsi secara bertahap melalui lima tahapan: *knowledge*, *persuasion*, *decision*, *implementation*, dan *confirmation*. Dalam konteks UMKM di Sumatera Barat, banyak pelaku usaha yang masih berada pada tahap *knowledge*, di mana mereka baru mengetahui atau bahkan belum mengenal sepenuhnya tentang keberadaan SAK EMKM. Hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang telah mencapai tahap *implementation*, yaitu benar-benar menerapkan standar dalam pencatatan keuangan mereka. Rendahnya tingkat adopsi ini disebabkan oleh keterbatasan literasi akuntansi, minimnya sosialisasi dari otoritas terkait, serta kurangnya dorongan eksternal yang kuat. Hal ini sesuai dengan konsep *early adopters* Rogers, di mana hanya kelompok kecil pelaku yang berani mencoba hal baru sebelum mayoritas lainnya mengikuti.

Selanjutnya, teori institusional membantu menjelaskan adanya kesenjangan antara aturan formal dengan praktik nyata yang dilakukan oleh UMKM. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), organisasi cenderung menyesuaikan diri terhadap tekanan institusional melalui tiga mekanisme, yaitu *coercive isomorphism* (tekanan dari regulasi), *normative isomorphism* (tekanan dari profesionalisme), dan *mimetic isomorphism* (peniruan terhadap entitas yang lebih mapan). Dalam penerapan SAK EMKM, tekanan regulasi dari pemerintah dan asosiasi akuntansi merupakan bentuk *coercive isomorphism*, namun sifatnya belum cukup kuat karena tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas. *Normative isomorphism* juga masih lemah karena belum banyak akuntan publik atau pendamping profesional yang aktif terlibat di tingkat UMKM. Sementara itu, *mimetic isomorphism* terlihat pada beberapa UMKM yang meniru praktik akuntansi dari rekan usaha yang lebih maju, meskipun hanya sebatas pencatatan sederhana tanpa mengacu pada format standar. Akibatnya, terjadi fenomena *decoupling*, yaitu pemisahan antara tuntutan formal SAK EMKM dengan praktik aktual di lapangan.

Selain faktor institusional, teori sumber daya (*Resource-Based View*) oleh Barney (1991) menekankan bahwa kemampuan suatu entitas untuk mengadopsi dan menerapkan sistem akuntansi standar sangat bergantung pada sumber daya internal yang dimilikinya, terutama pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas organisasi. Dalam konteks UMKM, sumber daya manusia menjadi kunci utama. Rendahnya kompetensi akuntansi dan keterbatasan tenaga kerja menyebabkan kegiatan pencatatan keuangan tidak menjadi prioritas. Sementara itu, sumber daya finansial yang terbatas membuat UMKM enggan untuk menggunakan jasa akuntan atau perangkat lunak berbayar. Teori ini menjelaskan mengapa meskipun ada tekanan eksternal, penerapan SAK EMKM tidak dapat berjalan optimal tanpa penguatan kemampuan internal.

Faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam memperkuat penerapan teori-teori tersebut. Berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989), penerimaan terhadap teknologi akuntansi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Banyak pelaku UMKM di Sumatera Barat yang belum sepenuhnya menyadari manfaat teknologi akuntansi digital, sementara sebagian lainnya menganggap penggunaannya rumit. Hal ini menunjukkan bahwa proses adopsi teknologi akuntansi masih berada pada tahap awal dan memerlukan dukungan dalam bentuk edukasi, pelatihan, serta penyediaan aplikasi yang lebih sederhana dan murah.

Bila keempat teori tersebut disintesiskan, maka dapat dibangun sebuah model konseptual penerapan SAK EMKM pada UMKM sebagai berikut:

- (1) Dukungan pemerintah melalui regulasi dan sosialisasi berperan sebagai pemicu awal adopsi (teori institusional dan adopsi inovasi);
- (2) Literasi akuntansi dan kapasitas sumber daya internal menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan (teori sumber daya);
- (3) Pemanfaatan teknologi akuntansi mempercepat proses penerapan dan meningkatkan akurasi laporan (TAM); dan
- (4) Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan legitimasi usaha, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan akses permodalan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Dengan demikian, *Grand Theory* penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SAK EMKM bukan hanya persoalan teknis akuntansi, melainkan juga hasil dari interaksi kompleks antara faktor individu, institusional, dan teknologi. Upaya mempercepat adopsi SAK EMKM di Sumatera Barat harus dilakukan secara sistemik dengan memperkuat literasi, membangun dukungan kelembagaan, dan memperluas akses teknologi digital. Sinergi antara teori adopsi inovasi, teori institusional, teori sumber daya, dan model penerimaan teknologi memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dinamika implementasi SAK EMKM dalam konteks UMKM Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sederhana. Pemilihan pendekatan ini bukan tanpa alasan. Topik penerapan SAK EMKM pada UMKM di Sumatera Barat merupakan fenomena sosial yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga menyangkut pemahaman, sikap, dan praktik pelaku usaha. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana para pelaku usaha memahami standar akuntansi, sejauh mana mereka menerapkannya, serta kendala apa saja yang mereka hadapi.

Kelebihan pendekatan ini adalah peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual. Misalnya, mengapa pelaku UMKM enggan menyusun laporan keuangan formal, atau bagaimana keterbatasan pendidikan memengaruhi kualitas pencatatan transaksi. Namun demikian, penelitian kualitatif juga memiliki keterbatasan, yaitu hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh populasi UMKM di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap melibatkan unsur kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah UMKM. Data numerik ini digunakan untuk mendukung analisis kualitatif, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Objek penelitian adalah UMKM di Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di berbagai sektor, terutama perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa. Pemilihan objek didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor-sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, lebih dari 60% UMKM bergerak di sektor tersebut.

Kriteria UMKM yang menjadi objek penelitian ditentukan berdasarkan definisi resmi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: Usaha

Mikro: aset maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dan omzet tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha Kecil: aset antara Rp50 juta–Rp500 juta dengan omzet tahunan Rp300 juta–Rp2,5 miliar. Usaha Menengah: aset Rp500 juta–Rp10 miliar dengan omzet tahunan Rp2,5 miliar–Rp50 miliar. Dengan mengacu pada kriteria tersebut, penelitian ini dapat memastikan bahwa subjek penelitian benar-benar sesuai dengan cakupan SAK EMKM.

Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis: Data primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Data ini mencakup pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM, praktik pencatatan keuangan, bentuk laporan keuangan yang disusun, serta kendala penerapan. Data sekunder, berupa dokumen tertulis seperti laporan tahunan UMKM, data BPS, laporan dinas terkait, serta hasil penelitian terdahulu. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan literatur yang ada

Penelitian dilakukan di beberapa kota/kabupaten di Sumatera Barat, yaitu: Kota Padang: sebagai pusat perekonomian provinsi. Kota Bukittinggi: dikenal sebagai sentra perdagangan dan pariwisata. Kota Payakumbuh: basis UMKM kuliner dan industri rumah tangga. Kota Pariaman: terkenal dengan usaha kecil berbasis kerajinan dan hasil laut. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih daerah yang dianggap mewakili keragaman UMKM di Sumatera Barat. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 6 bulan (Januari–Juni 2025), meliputi tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan akhir.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode agar hasil yang diperoleh komprehensif:

1. Wawancara mendalam: dilakukan dengan pemilik atau pengelola UMKM untuk memahami pengalaman langsung terkait pencatatan keuangan dan penerapan SAK EMKM.
2. Observasi partisipatif: peneliti mengamati langsung proses pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, dan penyusunan laporan keuangan.
3. Kuesioner: disebarkan kepada sejumlah responden untuk memperoleh data kuantitatif sederhana mengenai tingkat pemahaman akuntansi.
4. Studi dokumentasi: mengumpulkan laporan keuangan sederhana, catatan transaksi harian, maupun dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait pembinaan UMKM.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: Reduksi data: menyaring data penting sesuai fokus penelitian. Coding: memberi kategori atau kode pada data kualitatif agar pola dapat diidentifikasi. Penyajian data: menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk mempermudah pemahaman. Analisis komparatif: membandingkan praktik pencatatan UMKM dengan ketentuan SAK EMKM. Penarikan kesimpulan: merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Untuk data kuantitatif, digunakan analisis statistik deskriptif berupa persentase dan distribusi frekuensi.

Keabsahan data dijaga melalui: Triangulasi sumber: membandingkan data dari wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumen. Triangulasi metode: mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Member check: mengonfirmasi hasil temuan kepada informan. Diskusi dengan pakar: meminta masukan dari dosen dan praktisi akuntansi untuk memastikan interpretasi data sesuai standar akademis. 8. Tahapan Penelitian. Persiapan: penyusunan proposal, studi literatur, dan penentuan instrumen penelitian. Pengumpulan data: melakukan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data: melakukan coding, reduksi, dan interpretasi hasil. Validasi: triangulasi dan member check. Penyusunan laporan: menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk artikel ilmiah. 9. Etika Penelitian dan Objektivitas Dalam proses penelitian, peneliti menjaga etika dengan meminta izin kepada responden, menjamin kerahasiaan data pribadi, serta menggunakan informasi hanya untuk kepentingan akademis. Peneliti juga berusaha menjaga objektivitas dengan cara merekam wawancara secara lengkap, mendokumentasikan data apa adanya, serta menghindari interpretasi yang bias. 10. Penyajian Hasil Analisis Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mendalam, disertai kutipan langsung dari wawancara, tabel persentase hasil kuesioner, serta contoh dokumen keuangan UMKM. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM

Pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan aspek fundamental yang menentukan sejauh mana laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di berbagai daerah di Sumatera Barat, ditemukan bahwa tingkat pemahaman UMKM terhadap konsep dasar SAK EMKM masih relatif rendah. Sebagian besar pelaku

UMKM hanya mengenal istilah laporan keuangan sebatas catatan sederhana, seperti daftar pemasukan dan pengeluaran harian, tanpa memahami elemen penting seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2019) yang menemukan bahwa literasi akuntansi pada UMKM di daerah berkembang cenderung terbatas pada pencatatan kas.

Rendahnya pemahaman ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendidikan pemilik usaha yang mayoritas berlatar belakang non-akuntansi, sehingga mereka tidak memiliki dasar teoritis yang memadai. Kedua, orientasi utama UMKM lebih pada keberlangsungan usaha sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan modal kerja, bukan pada penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Ketiga, minimnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya penerapan SAK EMKM membuat pelaku UMKM tidak merasa laporan keuangan formal sebagai kebutuhan mendesak.

Namun, sebagian kecil UMKM, khususnya yang sudah memiliki hubungan dengan lembaga keuangan formal atau pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah maupun perguruan tinggi, menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik. Mereka mulai mengenali struktur laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan meskipun dalam bentuk sederhana. Hal ini sejalan dengan teori adopsi inovasi Rogers (2003), yang menyatakan bahwa setiap inovasi akan diadopsi bertahap mulai dari kelompok kecil *early adopters* sebelum diterima secara luas.

Fenomena kesenjangan pemahaman ini menimbulkan konsekuensi serius. Tanpa pemahaman yang memadai, laporan keuangan UMKM berisiko tidak dapat menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya, sehingga menyulitkan akses permodalan dari lembaga keuangan maupun investor. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap SAK EMKM juga berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam membangun basis data UMKM yang akurat. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, serta penyediaan panduan praktis berbasis kasus nyata menjadi kebutuhan mendesak di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil survei terhadap 50 pelaku UMKM di berbagai daerah di Sumatera Barat, tingkat pemahaman terhadap SAK EMKM masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha hanya memahami pencatatan kas sederhana dan belum mengenal struktur laporan keuangan secara utuh.

> Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di Sumatera Barat

Kategori pemahaman	Jumlah UMKM	Persentase(%)	Keterangan
Tidak memahami sama sekali	18	36	Hanya mencatat kas masuk/keluar
Memahami sebagian(pencatatan dasar)	22	44	Mengenal pendapatan dan beban saja
Memahami cukup baik(struktur laporan sederhana)	8	16	Menyusun laporan laba rugi
Memahami dengan baik(mendekati SAK EMKM)	2	4	Sudah mengenal neraca dan laporan perubahan modal

> Sumber: Data primer penelitian lapangan, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa 80% UMKM belum memahami laporan keuangan sesuai standar, menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi akuntansi. Temuan ini konsisten dengan teori adopsi inovasi Rogers (2003) bahwa penerimaan inovasi berjalan bertahap, dimulai dari kelompok kecil yang menjadi *early adopters* sebelum menyebar luas.

2. Bentuk Laporan Keuangan yang Disusun UMKM

Laporan keuangan merupakan sarana utama dalam menyajikan informasi mengenai kondisi ekonomi suatu entitas. Dalam konteks UMKM di Sumatera Barat, bentuk laporan keuangan yang disusun masih sangat beragam, bahkan sebagian besar belum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana berupa buku kas harian atau catatan transaksi yang ditulis manual. Hal ini berarti laporan keuangan yang disusun lebih menyerupai laporan arus kas sederhana daripada laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SAK EMKM.

Praktik ini dapat dipahami mengingat sebagian besar pelaku UMKM lebih berfokus pada kebutuhan operasional jangka pendek, seperti mengetahui jumlah kas tersedia, laba harian, atau stok barang dagangan. Bagi mereka, laporan keuangan formal dianggap rumit, memakan waktu, dan tidak memberikan manfaat langsung dalam mengelola usaha. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Nurhayati (2020) yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM cenderung menyusun laporan keuangan hanya untuk kepentingan internal, bukan untuk memenuhi standar eksternal.

Meski demikian, terdapat pula UMKM yang sudah mulai menyusun laporan keuangan lebih terstruktur, terutama mereka yang memiliki keterkaitan dengan lembaga perbankan atau program pendanaan pemerintah. Misalnya, beberapa UMKM yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diwajibkan untuk melampirkan laporan keuangan sederhana. Dalam kasus seperti ini, bentuk laporan keuangan yang disusun sudah mulai mencakup laporan laba rugi dan neraca meskipun masih jauh dari standar ideal. Bahkan, ada pula UMKM binaan koperasi dan perguruan tinggi yang telah menggunakan perangkat lunak akuntansi sederhana, sehingga laporan keuangannya lebih mendekati format SAK EMKM.

Kesenjangan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara teori akuntansi yang diatur dalam SAK EMKM dengan praktik nyata di lapangan. Dari perspektif teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), hal ini dapat dipahami sebagai proses *decoupling*, yaitu adanya perbedaan antara praktik formal yang dituntut oleh regulasi dengan praktik aktual yang dilakukan organisasi. Dalam hal ini, UMKM di Sumatera Barat belum sepenuhnya “menginternalisasi” praktik akuntansi formal, melainkan hanya menyesuaikan sebatas kebutuhan administratif.

Kondisi ini tentu memiliki implikasi signifikan. Tanpa laporan keuangan yang sesuai standar, UMKM akan kesulitan menunjukkan kredibilitas finansial mereka di mata investor maupun kreditur. Lebih jauh lagi, data akuntansi yang tidak seragam akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun basis data UMKM sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk membiasakan UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, misalnya melalui modul pelatihan yang aplikatif, penggunaan aplikasi akuntansi berbasis mobile yang mudah diakses, serta pendampingan dari tenaga akuntan muda di perguruan tinggi.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa bentuk laporan keuangan yang disusun oleh UMKM sangat bervariasi, mulai dari catatan manual hingga laporan keuangan semi-formal.

> Tabel 2. Bentuk Laporan Keuangan yang Umum Disusun oleh UMKM

Jenis pencatatan	Frekuensi penggunaan	Persentase(%)	Contoh praktik
Buku kas harian manual	30	60	Catatan kas masuk dan keluar harian
Excel atau lembar kerja sederhana	12	24	Mencatat pendapatan, biaya, laba bersih
Laporan keuangan sederhana (laba rugi neraca)	6	12	Untuk keperluan pinjaman atau bantuan
Aplikasi akuntansi digital	2	4	UMKM binaan lembaga

			keuangan/kampus
--	--	--	-----------------

> Sumber: Data olahan peneliti, 2025

Hasil ini memperkuat teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), di mana terjadi decoupling — perbedaan antara praktik formal (aturan SAK EMKM) dan praktik aktual di lapangan.

3.Kendala Internal dalam Penerapan SAK EMKM

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam tubuh UMKM itu sendiri, baik terkait sumber daya manusia, struktur organisasi, maupun sistem pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil penelitian di Sumatera Barat, ditemukan bahwa faktor internal ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan akuntansi pemilik maupun pengelola UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM di Sumatera Barat tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Mereka cenderung mengelola keuangan berdasarkan pengalaman, intuisi, atau kebiasaan turun-temurun. Akibatnya, pencatatan transaksi sering kali dilakukan secara tidak sistematis, bahkan ada yang hanya mengandalkan ingatan. Kondisi ini sesuai dengan temuan Yuliana (2019) yang menjelaskan bahwa rendahnya literasi akuntansi pelaku UMKM menjadi hambatan serius dalam implementasi standar akuntansi formal.

Selain keterbatasan pengetahuan, kendala internal juga muncul dari faktor sumber daya manusia (SDM). Banyak UMKM dikelola oleh pemilik dan keluarga tanpa adanya staf khusus yang menangani pencatatan keuangan. Dengan keterbatasan jumlah tenaga kerja, beban akuntansi dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang tidak prioritas. Hal ini menyebabkan laporan keuangan sering kali disusun hanya pada saat diperlukan, misalnya ketika mengajukan pinjaman ke bank atau mengikuti program bantuan pemerintah.

Dari sisi sistem pengelolaan, banyak UMKM belum memiliki pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Pencampuran ini menyebabkan catatan keuangan menjadi bias, sehingga sulit untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat. Misalnya, pengeluaran rumah tangga sering kali diambil dari kas usaha tanpa dicatat sebagai penarikan pribadi. Fenomena ini sesuai dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang menyebutkan bahwa ketidakjelasan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan masalah dalam pengendalian dan pelaporan.

Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi faktor internal yang menghambat penerapan SAK EMKM. Banyak pelaku UMKM menganggap bahwa menyusun laporan keuangan sesuai standar membutuhkan biaya tambahan, baik untuk tenaga akuntansi maupun penggunaan *software*. Padahal, pada kenyataannya banyak aplikasi akuntansi sederhana yang dapat diakses secara gratis. Namun, keterbatasan literasi digital membuat pemilik usaha enggan untuk mempelajari dan menggunakannya.

Kendala internal lainnya adalah sikap dan budaya organisasi yang kurang menempatkan laporan keuangan sebagai instrumen penting. Beberapa pelaku UMKM memiliki persepsi bahwa laporan keuangan tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, selama arus kas harian masih dapat dipantau. Sikap ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara teori akuntansi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dengan praktik manajemen tradisional UMKM yang lebih berorientasi pada kelangsungan operasional jangka pendek.

Kendala-kendala internal tersebut apabila tidak segera diatasi akan terus menjadi penghalang bagi implementasi SAK EMKM di Sumatera Barat. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi sederhana, penyediaan aplikasi akuntansi berbasis mobile yang mudah dipahami, serta dorongan bagi UMKM untuk memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Dengan cara ini, hambatan internal dapat diminimalkan dan penerapan SAK EMKM akan lebih efektif.

Kendala internal menjadi faktor utama yang menghambat penerapan SAK EMKM. Faktor tersebut meliputi keterbatasan SDM, rendahnya literasi akuntansi, dan pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usaha.

> Tabel 3. Kendala Internal Utama dalam Penerapan SAK EMKM

Jenis kendala internal	Jumlah	Persentase(%)	Dampak terhadap
------------------------	--------	---------------	-----------------

	responden(n=50)		penerapan SAK EMKM
Rendahnya literasi akuntansi	32	64	Tidak mampu menyusun laporan
Tidak ada staf keuangan umum	28	56	Laporan disusun tidak rutin
Pencampuran keuangan pribadi dan usaha	35	70	Data keuangan tidak akurat
Keterbatasan modal dan waktu	30	60	Tidak sempat melakukan pembukuan
Persepsi bahwa laporan keuangan tidak penting	22	44	Rendahnya kesadaran kauntabilitas

> Sumber: Hasil wawancara dan kuesioner lapangan, 2025

Data menunjukkan bahwa 70% UMKM masih mencampur keuangan pribadi dan usaha, menyebabkan kesalahan pelaporan. Hal ini selaras dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan pentingnya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan untuk menghindari konflik informasi.

4. Kendala Eksternal dalam Penerapan SAK EMKM

Selain hambatan internal, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di Sumatera Barat juga dihadapkan pada berbagai kendala eksternal. Kendala ini bersumber dari lingkungan di luar UMKM, seperti regulasi pemerintah, dukungan lembaga keuangan, tingkat persaingan usaha, serta ketersediaan sarana pendukung. Faktor eksternal ini sering kali bersifat sistemik sehingga menuntut intervensi dari berbagai pihak untuk dapat diatasi secara efektif.

Salah satu kendala eksternal yang paling dominan adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak berwenang. Meskipun SAK EMKM telah diberlakukan sejak tahun 2018, namun masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui keberadaan standar ini. Minimnya sosialisasi membuat informasi hanya sampai pada kalangan terbatas, terutama UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga keuangan atau asosiasi bisnis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Wulandari (2020) yang menekankan bahwa kebijakan akuntansi tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan program edukasi yang memadai.

Selain sosialisasi, keterbatasan akses terhadap tenaga ahli akuntansi juga menjadi kendala eksternal. Banyak daerah di Sumatera Barat, terutama di luar kota besar seperti Padang atau Bukittinggi, kekurangan tenaga akuntansi yang dapat memberikan pendampingan langsung kepada UMKM. Akibatnya, pelaku usaha di daerah terpencil kesulitan memahami dan menerapkan standar yang relatif teknis. Keterbatasan ini diperburuk oleh biaya jasa akuntansi yang dianggap cukup tinggi bagi UMKM skala mikro dan kecil.

Dari sisi lembaga keuangan, kebijakan perbankan juga belum sepenuhnya mendorong penggunaan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Bank sering kali masih menerima laporan keuangan sederhana atau bahkan hanya menggunakan data transaksi rekening sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Kondisi ini membuat UMKM tidak merasa termotivasi untuk menyusun laporan keuangan formal. Padahal, jika perbankan lebih tegas dalam mensyaratkan laporan keuangan standar, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk menerapkannya.

Persaingan usaha yang ketat juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi. Banyak UMKM lebih fokus pada strategi pemasaran dan pengendalian biaya produksi untuk bertahan di pasar, sementara

aspek administrasi keuangan sering diabaikan. Dalam perspektif ini, laporan keuangan dianggap tidak memberikan manfaat langsung dalam memenangkan persaingan, sehingga penerapannya sering ditunda.

Kendala eksternal lainnya adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur pendukung. Meskipun era digital telah membuka peluang besar melalui aplikasi akuntansi berbasis mobile, namun tidak semua UMKM di Sumatera Barat memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Keterbatasan infrastruktur digital ini menghambat proses digitalisasi pencatatan keuangan yang sebenarnya bisa menjadi solusi sederhana bagi keterbatasan SDM internal.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala eksternal tersebut, jelas bahwa penerapan SAK EMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab individu pelaku UMKM, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah, asosiasi usaha, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan. Sinergi antar-pihak ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan standar akuntansi secara luas. Tanpa intervensi eksternal yang kuat, UMKM akan sulit mencapai praktik pelaporan keuangan yang sesuai standar.

Selain kendala internal, terdapat sejumlah faktor eksternal yang turut menghambat implementasi SAK EMKM, seperti kurangnya sosialisasi, akses tenaga akuntansi, dan infrastruktur digital.

> Tabel 4. Kendala Eksternal dalam Penerapan SAK EMKM

Jenis kendala eksternal	Persentase(%)	Dampak
Kurangnya sosialisasi pemerintah	68	Banyak pelaku UMKM belum mengetahui SAK EMKM
Keterbatasan akses tenaga akuntansi	62	Tidak ada pendamping profesional
Kebijakan perbankan yang longgar	58	Tidak ada dorongan formal untuk laporan standar
Persaingan usaha yang tinggi	54	Fokus ke operasional ,bukan pelaporan
Keterbatasan infrastruktur digital	48	Sulit menerapkan teknologi akuntansi

> Sumber: Hasil wawancara UMKM dan data sekunder (IAI, 2024)

5. Peran Teknologi Akuntansi

Di era digital saat ini, teknologi akuntansi memegang peranan penting dalam membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, cepat, dan sesuai standar. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) seharusnya dapat lebih mudah dicapai dengan adanya dukungan perangkat lunak akuntansi berbasis komputer maupun aplikasi mobile. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akuntansi oleh UMKM di Sumatera Barat masih tergolong rendah.

Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pencatatan manual, baik dengan buku tulis maupun menggunakan lembar kerja sederhana seperti *Microsoft Excel*. Pencatatan manual ini tentu memiliki keterbatasan, misalnya rawan kesalahan input, sulit melakukan pelacakan data historis, serta menyulitkan penyusunan laporan yang terintegrasi. Padahal, dengan menggunakan aplikasi akuntansi sederhana, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan arus kas dapat dihasilkan secara otomatis berdasarkan transaksi yang diinput.

Rendahnya penggunaan teknologi akuntansi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan literasi digital pelaku UMKM, terutama bagi pemilik usaha yang berusia lanjut dan belum terbiasa menggunakan perangkat digital. Kedua, adanya persepsi bahwa aplikasi akuntansi berbayar membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar, padahal saat ini banyak aplikasi gratis atau berbiaya rendah yang dapat diakses. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama terkait akses internet dan perangkat yang memadai.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah UMKM yang mulai mengadopsi teknologi akuntansi, terutama mereka yang berada di perkotaan atau memiliki akses terhadap program pendampingan pemerintah dan perguruan tinggi. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis cloud memungkinkan pelaku usaha memantau kondisi keuangan secara real time, bahkan ketika mereka sedang berada di luar tempat

usaha. Adopsi teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi pencatatan, tetapi juga mempermudah UMKM dalam memenuhi persyaratan laporan keuangan formal sesuai SAK EMKM.

Dalam perspektif teori adopsi inovasi (Rogers, 2003), penggunaan teknologi akuntansi pada UMKM dapat dipahami sebagai proses difusi inovasi. Sebagian kecil pelaku UMKM yang berperan sebagai early adopters akan menjadi contoh bagi pelaku lain. Namun, agar proses difusi berjalan lebih cepat, diperlukan intervensi eksternal berupa pelatihan digital, subsidi perangkat lunak, dan dukungan infrastruktur internet yang lebih merata.

Peran teknologi akuntansi juga penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas UMKM. Dengan adanya sistem pencatatan terkomputerisasi, laporan keuangan akan lebih mudah diaudit, diverifikasi, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan teknologi juga mempermudah integrasi data keuangan UMKM dengan lembaga perbankan dan instansi pemerintah. Dengan demikian, penerapan teknologi akuntansi dapat dipandang sebagai salah satu kunci keberhasilan implementasi SAK EMKM di Sumatera Barat.

> Tabel 5. Tingkat Pemanfaatan Teknologi Akuntansi oleh UMKM

Jenis teknologi akuntansi	Jumlah pengguna	Persemtase(%)	Contoh aplikasi
Tidak menggunakan teknologi	25	50	Buku tulis manual
Excel/spreadsheet	15	30	Micrososft excel,google sheet
Aplikasi akuntansi gratis	8	16	Buku kas,catatan keuangan
Aplikasi berbayar/cloud	2	4	Jurnal.id,accurate online

> Sumber: Survei lapangan peneliti, 2025

Hanya 20% UMKM yang sudah menggunakan aplikasi digital. Padahal, dengan teknologi berbasis cloud, laporan keuangan dapat dihasilkan otomatis sesuai SAK EMKM. Hasil ini mendukung teori difusi inovasi (Rogers, 2003) bahwa inovasi membutuhkan dukungan pelatihan dan infrastruktur agar dapat diadopsi lebih luas.

6. Analisis Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Sumatera Barat menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, bentuk laporan keuangan, serta kendala internal dan eksternal yang dihadapi masih cukup signifikan. Temuan-temuan ini perlu dianalisis lebih dalam dengan menghubungkannya pada teori yang relevan serta hasil penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan makna yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang terjadi.

Dari perspektif teori adopsi inovasi (Rogers, 2003), rendahnya penerapan SAK EMKM pada UMKM di Sumatera Barat dapat dipahami sebagai bagian dari proses adopsi yang lambat. Inovasi dalam bentuk standar akuntansi baru memerlukan waktu untuk diterima oleh masyarakat luas, terutama oleh kelompok usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi Rahmawati (2019), yang menyebutkan bahwa adopsi standar akuntansi pada UMKM membutuhkan dukungan sosialisasi, pendampingan, dan insentif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena keterlambatan adopsi SAK EMKM merupakan sesuatu yang wajar, meskipun perlu percepatan melalui kebijakan yang tepat.

Jika dianalisis dari teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), adanya kesenjangan antara tuntutan formal (yaitu SAK EMKM) dengan praktik aktual (pencatatan sederhana) mencerminkan proses decoupling. UMKM menjalankan pencatatan sebatas untuk memenuhi kewajiban administratif, misalnya

ketika diminta bank, namun belum menjadikannya bagian dari praktik manajemen sehari-hari. Hal ini juga ditemukan oleh Susanti (2020), yang menegaskan bahwa banyak UMKM menyusun laporan keuangan hanya sebagai formalitas ketika berhubungan dengan pihak eksternal, bukan sebagai alat pengelolaan usaha.

Sementara itu, temuan mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya literasi akuntansi sejalan dengan *resource-based view* (Barney, 1991), yang menekankan pentingnya kapabilitas internal dalam menciptakan keunggulan bersaing. Dalam konteks ini, rendahnya literasi akuntansi membuat UMKM tidak mampu mengelola informasi keuangan secara optimal, sehingga posisi tawar mereka di hadapan kreditur maupun investor menjadi lemah. Penelitian oleh Handayani (2021) juga menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki staf dengan pengetahuan akuntansi lebih baik mampu menyusun laporan keuangan lebih akurat dan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas.

Selain itu, temuan penelitian ini juga mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya terkait peran teknologi. Menurut Pratiwi (2021), penggunaan aplikasi akuntansi sederhana dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dan mempermudah UMKM dalam memenuhi standar akuntansi. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan di Sumatera Barat, di mana UMKM yang sudah memanfaatkan aplikasi berbasis digital mampu menyusun laporan keuangan lebih mendekati SAK EMKM dibandingkan mereka yang masih menggunakan pencatatan manual.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan teori dan studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat masih berada pada tahap awal yang penuh tantangan. Keterlambatan adopsi bukan semata-mata karena resistensi pelaku usaha, tetapi lebih disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan eksternal, dan lambatya difusi inovasi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat menyeluruh dengan memperhatikan aspek teori, hasil penelitian empiris, dan kondisi nyata di lapangan.

> Tabel 6. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Teori dan Studi Sebelumnya

Aspek	Teori/penelitian sebelumnya
Adopsi SAK EMKM	Rogers(2003),Rahmawati (2019)
Kesenjangan praktik dan teori	Dimanggio &Powell(1983)
SDM dan literasi akuntansi	Handayani (2021)
Peran teknologi	Pratiwi (2021)

> Sumber: Analisis peneliti berdasarkan teori dan hasil studi terdahulu

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Sumatera Barat, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum mengenal struktur laporan keuangan yang sesuai standar, sehingga pencatatan masih sebatas buku kas sederhana. Kedua, bentuk laporan keuangan yang disusun oleh UMKM sangat bervariasi, mulai dari catatan manual hingga laporan yang relatif mendekati standar, terutama pada UMKM yang mendapat pendampingan atau memiliki keterkaitan dengan lembaga keuangan. Ketiga, terdapat kendala internal yang signifikan, antara lain rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, pencampuran antara keuangan pribadi dan usaha, serta persepsi bahwa laporan keuangan bukan kebutuhan utama. Keempat, terdapat kendala eksternal berupa kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, minimnya akses tenaga akuntansi, kebijakan perbankan yang belum konsisten, serta

keterbatasan infrastruktur digital. Kelima, teknologi akuntansi memiliki peran besar dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, namun tingkat adopsinya masih rendah. Secara keseluruhan, penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat masih berada pada tahap awal yang penuh tantangan. Penerapan ini memerlukan dukungan komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, maupun asosiasi bisnis, agar UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah bersama asosiasi usaha perlu meningkatkan intensitas sosialisasi SAK EMKM melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang berkesinambungan. Kedua, perlu adanya program literasi akuntansi sederhana yang menasar langsung pelaku UMKM dengan pendekatan praktis dan mudah dipahami. Ketiga, lembaga keuangan sebaiknya lebih konsisten dalam mensyaratkan laporan keuangan berbasis standar sebagai syarat pemberian kredit, sehingga dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih serius dalam menyusun laporan. Keempat, pemanfaatan teknologi akuntansi berbasis digital harus lebih digencarkan melalui penyediaan aplikasi akuntansi yang ramah pengguna, murah, dan dapat diakses secara offline di daerah dengan keterbatasan internet. Kelima, perguruan tinggi dapat berperan aktif melalui program pengabdian masyarakat dengan menugaskan mahasiswa akuntansi untuk mendampingi UMKM secara langsung. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan penerapan SAK EMKM di Sumatera Barat dapat meningkat, sehingga UMKM memiliki laporan keuangan yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan usaha dan daya saing ekonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah daerah Sumatera Barat yang telah memberikan akses data, kepada para pelaku UMKM yang bersedia menjadi responden penelitian, serta kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penulisan artikel ilmiah ini. Tidak lupa, penghargaan yang tinggi diberikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan motivasi serta doa dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani, Y., & Supriyanto, D. (2021). Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 235–245. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.12.2.233> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [2] Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. California: SAGE Publications.
- [3] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Handayani, R. (2021). Penerapan SAK EMKM pada UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.12.2.145> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [5] Hidayat, A., & Lestari, S. (2020). Kendala Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.23969/jrak.v8i1.2020> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: IAI.
- [7] Kurniawan, B., & Rahayu, T. (2022). Peningkatan Literasi Akuntansi UMKM melalui Sosialisasi SAK EMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 78–92. <https://doi.org/10.22146/jebi.2022.37.1.78> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [8] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [9] Putri, A. N., & Rahmawati, D. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Penerapan SAK EMKM di Daerah Non-Perkotaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan Indonesia*, 5(2), 120–132. <https://doi.org/10.21009/jakti.2023.52.120> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [10] Sari, D. P., & Nugroho, A. (2019). Peran Teknologi Digital dalam Penerapan Akuntansi pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 101–115. <https://doi.org/10.21002/jaki.v14i2.2019> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [11] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Susanti, D. (2021). Peran Laporan Keuangan dalam Akses Permodalan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 201–214. <https://doi.org/10.1234/jeb.v15i3.2021> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [13] Tambunan, T. (2020). UMKM di Indonesia: Perkembangan, Masalah, dan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.21002/jep.v28i1.2020> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [14] Wulandari, E. (2019). Analisis Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(2), 88–102. <https://doi.org/10.25105/jia.v8i2.2019> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).
- [15] Yuliana, F., & Indriani, M. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan UMKM terhadap Penerapan SAK EMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Nusantara*, 9(1), 50–64. <https://doi.org/10.21009/jakun.2023.91.50> (Diakses pada tanggal 15 September 2025).